



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



Batusangkar, Desember 2023

KATA PENGANTAR

Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan perangkat daerah agar menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya dengan mempedomani rencana kerja tahun sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika diamanatkan untuk menyusun Renja tahun 2025.

Rencana Kerja disusun untuk memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal ini bertujuan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha menyelesaikan penyusunan renstra dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan iptek dan tantangan pembangunan ke depan materi renja yang telah tersusun ini masih dimungkinkan penyesuaian dalam pelaksanaannya

Batusangkar, Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. YUSRIZAL, MM

Pembina Tk I

NIP. 19660601 199403 1 005

DAFTAR ISI

| | | |
|----------|--|----|
| BAB I. | PENDAHULUAN | |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | 7 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| | | |
| BAB II. | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN LALU | |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Tahun Lalu | 9 |
| | 2.2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan Tahun lalu , | |
| | 2.3. Realisasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keuaran yang direncanakan | 13 |
| | 2.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kinerja ./..... | 16 |
| | 2.5. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Datar | 31 |
| | 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 36 |
| | | |
| BAB III. | TUJUAN DAN SASARAN | |
| | 3.1. Telaahan Kebijakan nasional dan Renja K/L | 44 |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika . | 49 |
| | | |
| BAB IV. | TUGAS PEMBANTUAN | 62 |
| | | |
| BAB IV. | PENUTUP | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintahan, humas dalam instansi pemerintah memiliki visi dan misi yang jelas, yakni menciptakan sumberdaya manusia humas pemerintahan yang profesional, membentuk sistem manajemen humas, menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi kelancaran tugas kehumasan.

Sedangkan misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasikan, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah serta membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Praktisi humas pemerintahan dituntut memiliki kemampuan di bidang manajemen komunikasi termasuk di dalamnya pengetahuan akan komunikasi organisasi, audit komunikasi serta manajemen krisis komunikasi yang dapat diwujudkan secara langsung maupun melalui teknologi informasi yang sudah ada demi menjaga stabilitas dan standar tata kelola kehumasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kemajuan dan solusi pemerintah sebagai wacana untuk membentuk, meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik (*public trust*). Cakupan tata kelola kehumasan meliputi kegiatan menganalisis situasi disertai pengambilan data dan fakta, perencanaan dan pembuatan program, implementasi dan evaluasi. Tahapan tersebut memberi manfaat banyak baik dari sisi internal praktisi humas maupun masyarakat sebagai publik atau khalayak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Kementerian PANRB Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tatakelola Kehumasan Pemerintah, mengatur dengan jelas tentang komunikasi publik.

Permasalahan komunikasi publik masih saja menjadi tuntutan publik, salah satunya tidak berimbangnya komunikasi publik pemerintah daerah. Lebih dominan informasi pimpinan daerah sementara perangkat daerah dan lembaga lainnya sepertinyaa tidak di publis.

Kemudian Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mengatur bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tatakelola manajemen. Sejalan dengan itu mendukung dan penguatan atas kedudukan Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah yang beertanggungjawab atas penyelenggaraan SPBE, Penyelenggaraan Informasi Publik dan Menuju Satu Data Indonesia, perlu menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan membutuhkan anggaran yang memiliki tiga tujuan utama: stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun berdasarkan pemahaman bahwa ketiga tujuan penganggaran tersebut terkait erat satu sama lain. Makna yang terkandung dalam undang- undang ini: penerapan prinsip perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja ditujukan untuk mendukung upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berbagai elemen tujuan penganggaran ini perlu dikelola dengan baik agar ketiganya saling mendukung.

Perangkat daerah menyusun program dan anggaran terlebih dahulu memiliki Rencana Kerja tahun 2025 dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan atas ketersediaan input yang ada. Diantara input tersebut yang terpenting adalah penyediaan anggaran pelaksanaannya. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, mempunyai fungsi dinas yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk anggaran 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi Kebijakan Umum, serta Program/Kegiatan Pembangunan di lingkungan Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2025 adalah pelaksanaan tahun keempat program jangka menengah karena pencapaian sasaran strategis disusun 5 tahun dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini berarti pelaksanaan rencana kerja ini merupakan suatu komitmen bersama yang akan dipertanggung-jawabkan sebagai evaluasi keseluruhan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar periode 2025 disusun berdasarkan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
15. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
18. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE
19. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 32. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 33. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 34. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

39. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga serasi dan selaras sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.
2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat visi dan misi Kabupaten Tanah Datar serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

Tujuan adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Komunikasi dan Informatika

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Komunikasi dan Informatika

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Renja K/L

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Komunikasi dan Informatika

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Tahun Lalu

Renja tahun 2025 disusun berdasarkan tema pembangunan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkelanjutan”. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan RPJMD 2021-2026 misi 5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”.

Memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada sesuai dengan fungsi yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi urusan statistik dan persandian. Urusan ini dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan, yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan yang dituangkan secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 5 (lima) tahun RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategik dengan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Informasi Daerah.

Berdasarkan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tanah datar sampai dengan tahun berjalan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah

:

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2022

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2021 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|--------|------|---------|---------|
| | | | | | TARGET RENJA OPD TAHUN (n-2) | REALISASI RENJA OPD TAHUN (n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Terlaksananya perencanaan tahunan | 0% | 95.10% | 100% | 92.78% | 92.78% | 100% | 287.88% | 288% |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Lakip | 0% | 99,20% | 100% | 96.45% | 96.45% | 100% | 295.65% | 296% |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 100% | 98% | 100% | 98.41% | 0.98 | 100% | 296.41% | 296.41% |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan keuangan | 100% | 98,38% | 100% | 96.40% | 96.40% | 100% | 294.78% | 294.48% |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------|--------|------|--------|--------|------|----------|----------|
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebeleur kantor | 0% | 93.00% | 100% | 96.00% | 96.00% | 100% | 289.00% | 289.00% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpeliharanya mesin genset dan AC | 100% | 99.54% | 100% | 96.20% | 96.20% | 100% | 295.74% | 295.74% |
| 2 | 16 | 02 | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Monitoring | 0% | 91.38% | 100% | 53.70% | 53.70% | 100% | 245.08% | 245.08% |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tersedianya Informasi Luar Ruang | 100% | 79.85 | 100% | 89.56% | 89.56% | 100% | 8174.56% | 8174.56% |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | tersedianya data dan informasi tentang pemerintah daerah oleh PPID | 100% | 0 | 100% | 63.63% | 63.63% | 100% | 163.63% | 163.63% |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | 100% | 0 | 100% | 97.75% | 97.75% | 100% | 197.75% | 197.75% |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunikasi | tersedianya layanan informasi publik melalui KIM, Media Center dan radio | 100% | 46.90% | 100% | 95.92% | 95.92% | 100% | 242.82% | 242.82% |
| 2 | 16 | 03 | | | Program Aplikasi Informatika | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e - government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya Dokumen Master Plan dan Terlaksananya aplikasi dan website di kab. Tanah Datar | 100% | 94.59% | 100% | 87.04% | 87.04% | 100% | 281.63% | 281.63% |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tersedianya jaringan fiber optik dan internet | 100% | 97.05% | 100% | 87.14% | 87.14% | 100% | 284.19% | 284.19% |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------|--------|------|--------|--------|------|---------|---------|
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya Dokumen Data Sektoral | 100% | 90.12% | 100% | 97.54% | 97.54% | 100% | 287.66% | 287.66% |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Terolahnya data dan statistik daerah | 100% | 0 | 100% | 98.88% | 98.88% | 100% | 198.88% | 198.88% |
| 2 | 21 | | | | Urusan Pemerintah Bidang Persandian | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya pelaksanaan teknis persandian | 100% | 94.55% | 100% | 91.65% | 91.65% | 100% | 286.20% | 286.20% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan semua pelaksanaan program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan efisien, efektif dan ekonomis sehingga anggaran masih ada yang bersisa pada kegiatan dinas Komunikasi dan Informatika.

A. Program penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten kota.

a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah.

1. Pajak kendaraan Dinas.

Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran STNK (pajak kendaraan Dinas anata lain :

- Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (Empat) I Unit belum dapat dibayarkan karena terkendala administrasi tidak lengkap yaitu surat tanda nomor kendaraan hilang (tidak ada) dan telah mati pajak sejak tahun 2013 dan kendaraan roda 2 (dua) belum dapat dibayarkan pajak karena belum balik nama ke a.n Pemkap Tanah Datar dan belum dipindahkan keaset Dinas Kominfo.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

a. Perencanaan, penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (anggaran tidak tersedia pd th 2023)
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. (anggaran tidak tersedia pd th 2023)

b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

c. *Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah.*

1. Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.

d. *Adminstrasi Umum Perangkat daerah.*

1. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor.
2. Penyediaan bahan logistik kantor.
3. Penyediaan barang cetak dan pengandaan.
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. *Penyediaan jasa penunjang urusan Peemrintahan Daerah.*

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air,dan listrik.
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. *Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.*

1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak da perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan.
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik :

a. *Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten /kota.*

1. Pengelolaan media komunikasi Publik.
2. Pelayanan Informasi publik.
3. Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik.
4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan Komunitas.

III. Program Apilkasi Informatika.

a. *Pengelolaan e-Goverment Dilingkup Pemerintah daerah Kabpaten/kota.*

1. Pengembangan aplikasi dan Bisnis Pemerintah berbasis eltronik.
2. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah daerah

IV. Urusan Pemerintah Bidang Statistik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

- a. Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah Kabupaten kota.
 1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengolahan, analisis dan deseminasi data statistik sektoral.
 2. Penyelenggaraan otoritas statistiksektoral Di Daerah.

V. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

a. *Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.*

1. Penyediaan layanan kemanan informasi Pemerintah daerah.

Semua program dan kegiatan yang tersebut telah terealisasi sesuai dengan target dan terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala dan walaupun ditemuinya kendala dalam pelaksanaan telah dapat teratasi denagn baik.

3. Realiasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, pada prinsipnya semua kegiatan dapat terlaksana dan tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya pagu dana Rp. 4.375.000, dan relaisasi Rp. 4.375.000,-(100). Dan untuk akhir tahun RPJMD 2021-2026 masih ada terdapat program

dan kegiatan yang belum terlaksana terkait anggaran yang belum cukup untuk terlaksana dengan baik.

4 Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/Kegiatan.

Faktor tersebut dapat dijabarkan pada realisasi secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target/kegiatan.
 - Program Penunjang Urusan pemerintaha Daerah Kabupaten Kota dengan sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan. Kendalanya masih ada masih ada kendaraan Dinas yang belum balik nama dari Hibah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan masih belum ditemukannya surat-surat kendaraan Dinas tersebut, hal ini mempengaruhi capaian kerja.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN kendalanya kerana tunjangan pegawai/ ASN yang anggarkan utuk tiga bulan yaitu bulan Bulan Oktober – Desember) realisasi hanya 1 bulan di Bulan Desember 2022.

- b. Faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya target kinerja program dapat dijabarkan pada realisasi sbb:

A. Program penunjang ursan Pemerintah Daerah kabupaten Kota

- a. Administrasi Keuangan perangkat daerah.

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN .

Output kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan 31 ASN, anggaran Rp. 4.088.669.100, - realisasi 2.693.871.119,- (65,89%).

2. Kordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, Output Kegiatan ini berupa dokumen laporan keuangan, Anggaran Rp. 3.500.000 ,- realisasi Rp. 3.487.000,- (99.63%)

- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Administrasi Kepegawaian peranakat Daerah penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan, kegiatan ini berupa pengadaan baju Korpri untuk Pegawai/ ASN anggaran Rp. 4.375.000,-realisasi Rp. 4.375.000,- (100)
- c. Administrasi umum Perangkat Daerah.
1. Penyediaan komponen Isntasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan ini pembayaran atas pembelian bola lampu komponen listrik, kabel,, kabel Box. Anggaran Rp. 3.500.000,- Realisasi Rp. 3.293.000,- (94.09%)
 2. Penyediaan bahan Logistik
Kegiatan pembelian alat tulis kantor anatara lain kertas, pulpen, tinta computer, map, tip-ex, buku tulis,Binder Chips,lem dan lain-lain. Anggaran Rp. 47.000.000,- relaisasi Rp.46.740.500,- (99.45%)
 3. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan.
Kegiatan ini berupa pembayaran cetak blanko SPPD, Kwintasi Dinas, cetak map Kop dinas lambang tanah Datar dan cetak Kelender dan lain-lain. Pembayaran biaya untuk penggandaan cetak kelender tahun 2023 atau foto copy dan jilid laporan. Anggaran Rp. 161.000.000,- realisasi Rp.159.488.000,- (99.06%).
 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundangan-undangan.
Kegiatan untuk pembelian bahan bacaan, seperti surat kabar harian singgalang, rakyat sumbar dan langganan surat kabar media mingguan Pemerintah daerah . Anggaran Rp. 134.250.000,- RealisasiRp.99.200.000,- (73.09%).
 5. Fasilitas kunjungan tamu.
Kegiatan ini untuk belanja makan dan minum rapat-rapat dinas dan tamu dinas kegiatan ini terlaksana dengan baik. Anggaran Rp. 10.000.000,- relaisasi Rp.9,942,900,- (99,43 %).
 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
Kegiatan berupa pembayaran atas perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.Anggaran Rp. 120.000.000,- relisasi 118.398.100,- (98,67%)
- d. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja materai @Rp.10.000 sebanyak 150 buah dengan anggaran Rp. 1.500.000,- realisasi Rp.1.500.000,- (100 %).

2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran tagihan rekening Listrik, air, Telepon dan Belanja Internet untuk 3 gedung kantor, anggaran Rp. 127.000.000,- Realisasi Rp. 123.766.648,- (97,45%).

3. Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor.

Kegiatan ini direalisasikan untuk pembelian alat-alat kebersihan kantor seperti. Handshop, kanebo, kaset kaki kolset bertangkai komoceng, cling, super pel, wipol, sapu lidi sapu plastic, tisu, tong sampah dan peralatan kebersihan lainnya, dan juga pembayaran honor untuk Tenaga harian lepas (THL) sebagai berikut :

1. Tenaga kebersihan 2 Orang.
2. Penjaga kantor, 1 Orang.
3. Sopir mobil dinas BA 43, 1 Orang.

Anggaran Rp. 96.657.600,- Realisasi Rp. 93.189.700,- (96.41%).

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan.

Kegiatan ini digunakan berupa pemeliharaan kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan Roda empat 7 (enam) unit dan kendaraan roda 2, 4 (empat) unit antara lain :

2. Pengantian suku cadang.
3. Biaya jasa servis,
4. Pembelian BBM, Pelumas/oli.
5. Pajak kendaraan Dinas.

Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran STNK (pajak kendaraan Dinas) antara lain :

- Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak

1(satu) unit kendaraan dinas roda 4 (Empat) belum dapat dibayarkan karena terkendala administrasi tidak lengkap

yaitu surat tanda nomor kendaraan hilang(tidak ada) dan telah mati pajak sejak tahun 2013 dan kendaraan roda 2 (dua) belum dapat dibayarkan pajak karena belum balik nama ke a.n Pemkap Tanah Datar dan belum dipindahkan keaset Dinas Kominfo.

Anggaran Rp. 158.013.100,- Realisasi 150.794.399,- (95,43%)

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Kegiatan ini untuk pemeliharaan Ac pada Dinas Komunikasi dan Informatika jumlah ac yang terpelihara sebanyak 12 unit, anggaran Rp. 3.500.000,- realisasi .3.450.000,- (98,57%).

B. Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik pemerintah daerah kabupaten/Kota

1. Penelolan media Komunikasi Publik

Kegiatan ini direalisasikan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan tiang baliho 1 (satu) unit dengan lokasi, Batas Kota Padang Panjang dengan Kab. Tanah Datar
2. Cetak Baliho sebanyak 129 Buah dengan rincian:
 - Spanduk sebanyak 35 buah
 - Baliho 94 buah
3. Jumlah Berita Info Publik yang di kirim ke Kementerian Kominfo RI sebanyak 1.037 berita tentang pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan keberhasilan yang di capai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Menghimpun berita Website Pemkab Tanah Datar sebanyak 1.037 berita tentang pembangunan daerah dan keberhasilan yang di capai Pemkab Tanah Datar selama tahun 2022.
5. Menghimpun DIP OPD di Website PPID Tanah Datar 2001 DIP, 2434 Unduhan dan 63 permohonan Informasi Pemkab Tanah Datar tahun 2022.
6. Menghimpun Conten 357 VIDEO di Youtube Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar dengan Subscribers 4.620 Views 130.698 dan jam tayang 12.220,7 tahun 2022.
7. Berita pada media terbarukan (Facebook, Instagram, Twitter) sebanyak 3.111 berita tentang :
 - Pembangunan Daerah
 - Pendidikan
 - Himbauan-himbauan Progul-progul Kabupaten Tanah Datar.
8. Penyampaian informasi melalui Videotron sebanyak 129 Video terdiri dari Info Publik, Informasi Pembangunan Daerah ,

informasi social dan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas, himbauan PAD, pemadaman listrik dari OPD dan Instansi Vertikal di Kabupaten Tanah Datar.

9. Lembur dilaksanakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi melalui media dalam dan luar ruang.
 10. Biaya Fotocopi dan biaya cetak.
 11. Biaya makan minum rapat dan kegiatan.
 12. Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- Anggaran Rp. 450.107.800,- realisasi Rp.404.983.375,- (89,97%).

2. Pelayanan Informasi Publik

Output kegiatan ini berupa jumlah Dokumen yg ada di PPID kabuapten Tanah Datar 2.289 di PPID. Dokumen yang diaploayang diuplo Daftar Informasi Publik (DIP), 63 permohonan informasi publik, dan Bimbingan Teknis PPID Pembantu (Sekretataris Nagari) Se Kabupaten Tanah Datar, serta pembinaan 24 PPID Pembantu Nagari

3. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Output kegiatan ini berupa terlaksananya studi komperatif urnalis ke Jakarta ke LKBN Anatara dan Dewan Pers .

4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Output kegiatan ini berupa terlaksananya 6.935 jam siaran radio, kerja sama dengan media cetak 23 Media , dengan media online 50 Media, 25.000 kliping media cetak dan media online, 280 Pariwara cetak dan online dan TV Daerah.

a) Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Output kegiatan ini berupa terintegrasinya 15 aplikasi, tersedianya 52 Domain/website pemerintahan nagari, dokumen DED *Smartcity* jaringan Fiber Optik dan peresmian penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Aplikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online.untuk Tingkat SMP 1 dan SMP2 Batusangkar, Layanan persuratan bagi nagari (SIANA Mobile), Website Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), administrasi bagi

tamu (Buku Tamu), Sistem Informasi Pemberdayaan UMKM Tanah Datar (Siputar), Pengendalian Inflasi Daerah (Sidinda), Manajemen Lampu Jalan (Simanjalu), *E-Commerce* UMKM (E- Lopou).

- 2) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Output kegiatan ini berupa tersedianya jaringan fiber optik yang menghubungkan 40 perangkat daerah, internet gratis (free – wifi) di lapangan cindua mato, halaman istano basa pagaruyung dan halaman Istano

Penyusunan DED Smartcity Jaringan Fiber Optik.

Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas data seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan aplikasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar maka telah dilaksanakan penyusunan DED Smartcity jaringan Fiber Optik.

C. URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK.

- **Program Penyelenggaraan Statistik sektoral.**

Penyelenggaraan statistic sektoral dilingkup daerah Kabupaten Tanah Datar Kabupaten /Kota.

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- b) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Penialian statistic sektoral secara mandiri

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Output kegiatan ini berupa Terhimpunnya data statistik sektoral yang dirilis dalam dokumen tanah datar dalam angka 2023 dan dipublikasi kan pada Web Tanah Datar, tersedianya Portal data Tanah yakni data . tanahdatar.go.id, dan terlaksananaya kegiatan evaluasi Datar Penialian statistic sektoral secara mandiri.

- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Output kegiatan ini berupa Buku Profil Daerah Tanah Datar Tahun 2023.

- 3) Membangun Metadata statistic Sektoral

Output kegiatan ini Kabuapten Tanh Datar telah menyampaikan 32 Metadata kegiatan pada aplikasi Indah BPS.

- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
Output kegiatan ini Penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
Output kegiatan ini Bimbingan Teknis tentang ststistik sectoral kepada Pengelola data OPD Tanah Datar.

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Tahun 2023 Rp. 0,-

1. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 secara umum berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti walau terjadinya pengurangan belanja akibat reconfusing anggaran.

Kegiatan yang serapan anggarannya masih kurang karena adanya beberapa item kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Logistik Kantor kendalanya kerana kurang controlling kerana kasubag umum dan kepegawain pada dinas Komuniaki dan informatika masih kosong, Anggaran Rp18.594.000.- realisasi Rp.12.849.000,- (60,1%).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo
Kabupaten Tanah Datar

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| | | | | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun n | Tahun n+1 | Tahun (n-2) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks SPBE | | | 8 | 1,3 | 1,6 | 2.18 | 16 aplikasi | 2,18 | 2,10 | 3,21 | |
| 2 | Terlaksananya media layanan informasi masyarakat | | | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | |
| 3 | Jumlah pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika | | | 50 org | 50 org | 50 % | 50 % | 15 org | 56 % | 56 % | 50 % | |
| 4 | Predikat akuntabilitas kinerja | | | B | B | B | B | B | B | B | B | |

2.5 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR.

1. Isu Strategis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Datar
 - a. Pencapaian aplikasi yang terintegrasi untuk penerapan E-Government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Penambahan lokasi wifi/internet gratis bagi masyarakat dalam rangka memberikan fasilitasi masyarakat dalam pengembangan Smart City.
 - c. Penambahan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pemerintahan berbasis elektronik seperti penyediaan sarana dan prasarana ruang command center.

2. Isu Strategis Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik di Kabupaten Tanah Datar
 - a. Belum maksimalnya komitmen Pejabat Publik dalam fasilitasi keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Belum maksimalnya peran dan fungsi Kehumasan dalam memerankan Komunikasi dan Informatika sebagai Government Public Relation.
 - c. Perlunya memaksimalkan fungsi media-media milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk informasi bagi public dalam bentuk publikasi di Media Cetak, Audio, dan Visual.
 - d. Perlu adanya publikasi dan sosialisasi yang dapat mempromosikan daerah dengan memanfaatkan TIK dan media-media yang ada secara digital.
 - e. Belum maksimalnya peran Komunikasi dan Informasi dalam Diseminasi berbagai kebijakan pemerintah pada public yang memanfaatkan kelompok-kelompok informasi yang ada di masyarakat.
 - f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusi pengelola Media Informasi dalam bentuk Audio dan Visual.
 - g. Perlunya Pemberdayaan atau Penguatan PPID Kabupaten tanah Datar.

3. Isu Strategis Pengelolaan Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Datar.
 - a. Belum adanya SDM yang menguasai keahlian bidang statistik.

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK untuk mendukung pengelolaan statistik sektoral.
 - c. Belum adanya aplikasi data yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data.
4. Isu Strategis pengelolaan Bidang Persandian.
- a. Belum adanya peraturan nya peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolan persandian.
 - b. Belum adanya SDM sandimen.
 - c. Belum opitmalnya penerapan system manajemen kewanan informasi pada pemerintah Daerah.
 - d. Belum tersedianya sarana dan prasarana Persandian.

STRATEGI PENGEMBANGAN

1. Strategi Pengembangan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Datar
 - a. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK/SPBE .
 - b. Penyediaan jaringan internet kepada Nagari yang belum mempunyai akses inetrnet.
 - c. Melakukan proses rekrutmen atau peningkatan kapasitas SDM TIK.
 - d. Pengembangan aplikasi untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
2. Strategi Pengembangan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik di Kabupaten Tanah datar.
 - a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Government Public Relation Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
 - c. Peningkatan peran dan fungsi sarana dan prasarana komunikasi publik.
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Komunikasi dan Informatika.
3. Strategi Pengembangan Pengelolaan Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Datar
 - a. Pemenuhan jumlah SDM statistik dan peningkatan kualitas SDM statistik.

- b. Penyediaan sarana prasarana pendukung dalam mengelola statistik sektoral.
- c. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi sehingga dapat berbagi pakai dengan aplikasi lain.

Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD meliputi sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang berbasis IT;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Belum tersedianya Database sektoral dan khusus yang komprehensif di Kabupaten Tanah Datar;
 - d. Belum optimal teknologi persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
 - e. Masih adanya daerah yang *Blankspot* (tanpa sinyal) di Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Terbatasnya aplikasi yang dimiliki untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
 - (3) Pencapaian aplikasi yang terintegrasi untuk penerapan E-Government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.
 - (4) Penambahan lokasi wifi/internet gratis bagi masyarakat dalam rangka memberikan fasilitasi masyarakat dalam pengembangan Smart City.
 - (5) Penambahan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pemerintahan berbasis elektronik seperti command center, Pembuatan sarana dan prasarana untuk commad center.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari

perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran strategik yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahun) adalah:

Tujuan:

1. Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar Diujung Jari)
2. Menuju Government Publik Relation (GPR)

Sasaran:

1. Terwujudnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu;
2. Meningkatnya akses informasi masyarakat;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini sangat berarti bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempedomani pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama ini juga berguna untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2016-2021.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terwujudnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu | 1. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Dihitung dari jumlah aplikasi yang terintegrasi |
| 2. | Meningkatnya akses informasi masyarakat | Terlaksananya media layanan informasi masyarakat | Dihitung dari jumlah media yang digunakan |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Predikat akuntabilitas kinerja | Hasil Penilaian dari TIM Inspektorat Kabupaten Tanah Datar |

10. Formulasi Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Sesuai dengan Peraturan Ppresiden nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. unsur-unsur ini meliputi Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Infromasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Layanan SPBE. Intinya, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
 5. Government Public Relation
 6. Tanah Datar Satu Data
1. Isu Strategis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Datar
 - a. Masih adanya beberapa jorong/wilayah yang belum tersedianya jaringan telepon seluler (Blankspot Area).
 - b. Masih terbatasnya jumlah SDM yang memiliki sertifikasi ahli di bidang TIK.
 - c. Terbatasnya aplikasi yang dimiliki untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
 - d. Pencapaian aplikasi yang terintegrasi untuk penerapan E-Government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bila kita melihat usulan Rencana Kerja yang diusulkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah (SOPD) maka Rancangan Renja dari setiap Perangkat Daerah (SOPD) akan menjadi Rancangan Awal terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun Anggaran 2022. Untuk itu dapat diartikan bahwa fungsi dari rencana kerja ini sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk Dinas Kominfo.

Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada musrenbang telah disesuaikan program dan kegiatan prioritas dinas Kominfo serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengajukan permintaan yang telah diakomodir dalam program dan kegiatan, khusus untuk usulan kegiatan pengadaan alat pengujian mekanik semula dianggarkan dalam RKPD, kemudian diusulkan untuk dianggarkan melalui APBD. Program dan kegiatan yang diutamakan adalah yang sesuai dengan Rencana Strategis yang telah direncanakan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tanah Datar

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika. | | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan | 10.397.724.420 | Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika. | | | Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan | 7.238.054.600 | |
| | Program Penunjang, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | | Prententase laporan keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu | | 15.000.000 | | | Prententase laporan keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu | | | |
| | - Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya RKA,DPA,DPAP dll | 3 Dokumen | 7.150.000 | - Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersusunnya RKA,DPA,DPAP dll | | 11.999.875 | - |
| | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya tersusunnya Dokumen LAKIP | Tersedianya Laporan 1 Dokumen | 7.850.000 | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. | Dinas Komunikasi dan Informatika | tersusunnya Dokumen LAKIP, LKPD,LKPJ dan IKK | | 8.999.850 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.319.510.420 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.853.688.900 | |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Gai dan Tunjgan ASN | 27 ASN | 3.310.760.420 | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Gai dan Tunjgan ASN | | 2.839.689.100 | |
| | - Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Laporan keuangan Semester dan Laporan Tahunan | 2 Dokumen | 8.750.000 | - Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan | | 13.999.800 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 15.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | | | 9.970.000 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--|-------|-------------|--|
| - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terikuti ASN mengikuti Diklat | 15 ASN | 15.000.000 | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terikuti ASN mengikuti Diklat | | 9.970.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 369.964.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 258.563.525 | |
| - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | 10 Jenis | 6.800.000 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | 100 % | 3.999.800 | |
| - Penyediaan bahan Logistik Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 20 Jenis dan 8.000 Lembar | 30.000.000 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 100 % | 40.000.000 | |
| - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 20 Jenis dan 8.000 Lembar | 15.300.000 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 100 % | 11.059.025 | |
| - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | 15 Media | 166.364.000 | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | 100 % | 126.960.000 | |
| - Fasilitas kunjungan Tamu | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya makanan dan minuman tamu | 2 Kali kunjungan dan 10 kali rapat | 15.000.000 | - Fasilitas kunjungan Tamu | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya makanan dan minuman tamu | | 9.467.700 | |
| - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 20 paket | 125.000.000 | - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100 % | 67.077.000 | |
| - Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pemerintahan berbasis Elektronik | | 5.000.000 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | | | 278.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | | | 168.552.500 | |
| - Penyediaan Jasa surat menyurat | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya prangkodan benda pos lainnya | 150 lembar Materai 10.000 | 3.000.000 | - Penyediaan Jasa surat menyurat | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya prangkodan benda pos lainnya | 100 % | 1.500.000 | |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pembayaran jasa Komunikasi dan sumber daya air | 100 % | 140.000.000 | - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pembayaran jasa Komunikasi dan sumber daya air | 100 % | 129.500.000 | |
| - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya alat dan bahan pembersih | 3 orang THL 25 jenis | 135.000.000 | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya alat dan bahan pembersih terbayarnya honor THL | 100 % | 66.352.500 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | 410.000.000 | | | | | 113.663.100 |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | | | | |
| - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya kendaraan dinas | Roda 4 6 Unit, Roda 2 4 Unit | 145.000.000 | - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya kendaraan dinas | 100 % | 127.663.100 |
| - Pemeliharaan Mebel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya Peralatan kantor | Rehab meja dan pembelian kaca meja | 5.000.000 | - Pemeliharaan Mebel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya Peralatan kantor | 100 % | 1.000.000 |
| - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya Ac | 8 Unit | 10.000.000 | - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terpeliharanya Ac | 100 % | 5.000.000 |
| - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | | | | | | |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab. /Kota | | | | 1.104.285.829 | Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab. /Kota | | | | 2.208.386.850 |
| - Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah monitoring | Terlaksanan siarankeliling | 13.000.000 | - Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah monitoring | 100 % | 29.000.000 |
| - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya informasi luar ruangan, balih, spanduk | 35 paket spanduk dan 9 buahbalih | 440.822.400 | - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya informasi luar ruangan, balih, spanduk | 100 % | 408.249.875 |
| - Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya data dan informasi ttg pemerintah Daerah oleh PPID | 100 % | 38.290.000 | - Pelayanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya data dan informasi ttg pemerintah Daerah oleh PPID | 100 % | 133.890.850 |
| - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Menguatnya kapasitas sumber daya komunikasi Publik | 1 tahun | 54.640.000 | - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Menguatnya kapasitas sumber daya komunikasi Publik | 1 tahun | 246.496.300 |
| - Penyelenggaraan Hubungan masyarakat , Media dan kemitraan Komunitas | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya layanan iformasi public melalui Kim, media center dan Radio | 1 paket, 14 Kelompok | 557.533.429 | - Penyelenggaraan Hubungan masyarakat , Media dan kemitraan Komunitas | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya layanan iformasi public melalui Kim, media center dan Radio | 1 paket, 14 Kelompok | 1.389.849.825 |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | 875.699.173 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | | 1.562.400.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|--|
| | | | | | 875.699.173 | | | | | 1.562.400.000 | |
| | Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya aplikasi dan website | 1 Dokumen 12 aplikasi dan 17 aplikasi | 236.896.693 | - Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya aplikasi dan website | 100 % | 400.000.000 | |
| | - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah | | Tersedianya jaringan fiber optic dan internet | 2 lokasi Hotspot 32 OPD | 638.801.280 | - Pengembangan dan pengelolaan sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah | | Tersedianya jaringan fiber optic dan internet | 100 % | 1.162.400.000 | |
| | URUSAN PEMERINTAH BIDANGSTATISTIK | | Terhimpunya data sektoral | | 83.624.800 | URUSAN PEMERINTAH BIDANGSTATISTIK | | | Jumlah OPD yang mengakses data dan informasi melalui Web | - | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 128.294.400 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 83.624.800 | |
| | - Penyelenggaraan statistic sektoral di lngkup Daerah Kabupaten/kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Dokumen Data base OPD | 1 Dokumen | 128.294.400 | - Penyelenggaraan statistic sektoral di lngkup Daerah Kabupaten/kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya Dokumen Data base OPD | 100 % | 83.624.800 | |
| | - Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengelolaan analisis dan Deseminasi data stistik Sektoral. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya dokumen database OPD | 1 Dokumen | 42.864.400 | - Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengelolaan analisis dan Deseminasi data stistik Sektoral. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tersedianya dokumen database OPD | 100 % | 55.124.875 | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Pemeriontah Daerah dalam peningkatan mutu statistic Daerah yang terintegrasi | | | | 22.900.000 | | | | | | |
| | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | 31.178.000 | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | 13.480.000 | | | | | | |
| | - Pennyelenggaraan otoritas ststistik sektoral diDaerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terolahnya data data dan statistk | 1 Dokumen | 17.872.00 | - Pennyelenggaraan otoritas ststistik sektoral diDaerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terolahnya data data dan statistk | 100 % | 28.499.925 | |
| | | | | | | | | | | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN | | | | 63.999.900 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN | | | | 63.999.900 |
|--|----------------------------------|---|------------|------------|--|----------------------------------|---|-------|------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 1 Kegiatan | 35.000.000 | - PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 100 % | 63.999.900 |
| Penyeelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemeintah daerah Kabupaten/kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 1 Kegiatan | 35.000.000 | Penyeelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemeintah daerah Kabupaten/kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 100 % | 63.999.900 |
| - Penyediaan layanan keamanan infomasi Pemerintah daerah kabupaten /Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 1 Kegiatan | 35.000.000 | Penyediaan layanan keamanan infomasi Pemerintah daerah kabupaten /Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya pelaksanaan teknis Persandian | 100 % | 63.999.900 |

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan RKPD nantinya akan dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kegiatan dan merupakan kebutuhan masyarakat diantaranya melayani fasilitasi kebutuhan jaringan telekomunikasi seluler, fasilitasi kebutuhan jaringan internet, fasilitasi pengembangan aplikasi, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat dan wadah penyimpanan data pembangunan dilingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentinganakan tetapi tidak ada usulan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain-lainnya.

Fasilitasi untuk nagari yang berkaitan dengan SPBE yaitu pembuatan domain dan website nagari dengan menggunakan domain desa.id dan pembuatan aplikasi untuk administrasi nagari dengan nama aplikasi SIANA sehingga proses administrasi lingkungan nagari se Kabupaten Tanah Datar dapat dilakukan melalui aplikasi menggunakan jaringan internet. Saat ini sedang dikembangkan aplikasi layanan nagari dengan menggunakan smarphone yang disebut dengan SIANA mobile. Dan untuk mendukung hal tersebut perlu ketersediaan jaringan internet di nagari.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN TANAH DATAR**

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|-------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|---|-----------------------|---|--|--|---------|------|------------|------------|
| | | | | | TARGET RENJA OPD TAHUN (n-2) | REALISASI RENJA OPD TAHUN (n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | | | |
| 2 | | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | % | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Terlaksananya perencanaan tahunan | 0% | 0% | 100% | 92,78% | 92,78% | 100% | 192,78% | 207,78% |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Lkip | 0% | 99,20% | 100% | 96,45% | 96,45% | 100% | 295,65% | 307% |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 100% | 98% | 100% | 98,41% | 0,98 | 100% | 296,41% | 296,41% |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan keuangan | 100% | 98,38% | 100% | 96,40% | 96,40% | 100% | 294,78% | 305,79% |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya kelengkapannya | Tersedianya anggaran pendidikan dan pelatihan | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 200% | 200% |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya anggaran pendidikan dan pelatihan | 0% | 100% | 100% | 0% | 0 | 100% | 200% | 200% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | 100% | 94,09% | 100% | 99,75% | 99,75% | 100% | 293,84% | 293,84% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya ATK | 100% | 99,45% | 100% | 90,20% | 90,20% | 100% | 289,65% | 289,65% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 100% | 99,06% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 299,06% | 299,06% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan | 100% | 467390,00% | 100% | 76,56% | 76,56% | 100% | 467566,56% | 467566,56% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minum | 100% | 99,43% | 100% | 70,79% | 70,79% | 100% | 270,22% | 270,22% |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100% | 99,68% | 100% | 99,37% | 99,37% | 100% | 299,05% | 299,05% |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya pranko dan benda pos lainnya | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 300,00% | 300,00% |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan sumber daya air | 100% | 97,45% | 100% | 92,82% | 92,82% | 100% | 290,27% | 290,27% |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terselenggaranya Kebersihan Kantor | 100% | 96,41% | 100% | 99,04% | 99,04% | 100% | 295,45% | 295,45% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 100% | 95,43% | 100% | 97,67% | 97,67% | 100% | 293,10% | 293,10% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebleur kantor | 0% | 0,00% | 100% | 96,00% | 96,00% | 100% | 196,00% | 204,17% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpeliharanya mesin genset dan AC | 100% | 98,57% | 100% | 96,20% | 96,20% | 100% | 294,77% | 294,77% |
| 2 | 16 | 02 | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | | | | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) tahun 2020-2024, visi Kementerian Kominfo untuk tahun 2020-2021 untuk penyusunan rencana strategis ini mengaju dan mempedomani visi Indonesia adalah “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”.

Untuk melaksanakan visi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun misi antara lain :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika .

Adapun visi propinsi Sumatera Barat “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Dan perwujudan untuk mencapai tujuan Kementerian Kominfo yang akan diturunkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan misi propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan dya saing kepariwisatawan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun tujuan tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Meningkatnya implementasi E Government (SPBE);
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal;
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah propinsi;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Pelayanan Informasi berbasis Teknologi Informasi yang prima;
3. Penyelenggara Komunikasi Publik Resmi yang Intens;
4. Meningkatnya Kebijakan Internal SPBE;
5. Meningkatnya Tata Kelola SPBE;
6. Meningkatnya Layanan SPBE;

7. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal;
8. Peningkatan Pengaman Informasi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024, pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun *sasaran strategis* pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan

- pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
 3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
 4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim;
 6. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

TUJUAN Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Strategis Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan tabel VI untuk Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi terlampir pada renja Kominfo sebagai berikut ini :

| NO. | Sub Urusan | Kewenangan Daerah Propinsi | Layanan Utama |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Propinsi | Pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah Propinsi |
| 2 | Aplikasi Informatika | Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah propinsi Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah Daerah Propinsi | Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di tingkat propinsi Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Propinsi melalui pemanfaatan TIK. Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Propinsi melalui pemanfaatan TIK |

Sumber : Lampiran PP no. 18 tahun 2016

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar juga harus merujuk pada Renstra Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat.

Pada Propinsi Sumatera Barat Layanan Yang Utama dengan Kewenangan Urusan Konkuren Tingkat Propinsi yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Propinsi;
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Propinsi;
3. Pengelolaan e government di lingkup Pemerintah Daerah Propinsi.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam kurun waktu 2016-2021 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruhan wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI MENUJU KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Masyarakat Informasi :

Mendiskripsikan sebuah masyarakat ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan.

Terwujudnya Masyarakat informasi berarti diharapkan terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dari hanya menerima informasi menjadi aktif mencari informasi dan terlayannya seluruh lapisan masyarakat akan informasi dan fasilitas komunikasi yang berbasis elektronika sehingga akan menciptakan suatu masyarakat yang kaya akan informasi dan komunikatif dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar mengedepankan sikap profesionalisme, melayani kebutuhan masyarakat mulai dari pedesaan sampai pada masyarakat perkotaan terhadap akses komunikasi dan informatika serta mengakomodir fasilitas informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga dilanjutkan oleh Kominfo Propinsi Sumatera Barat yang menitikberatkan pada *Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Layanan Publik, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berbasis teknologi dalam rangka mengoptimalkan layanan Pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi;*
2. *Mewujudkan layanan komunikasi dan informatika secara jujur, benar, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mengembangkan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam upaya penyebaran informasi dan kecukupan informasi publik.*

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Hal ini dimaksudkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar mampu mencapai tujuan dan sasarnya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahunan) adalah sebagai berikut :

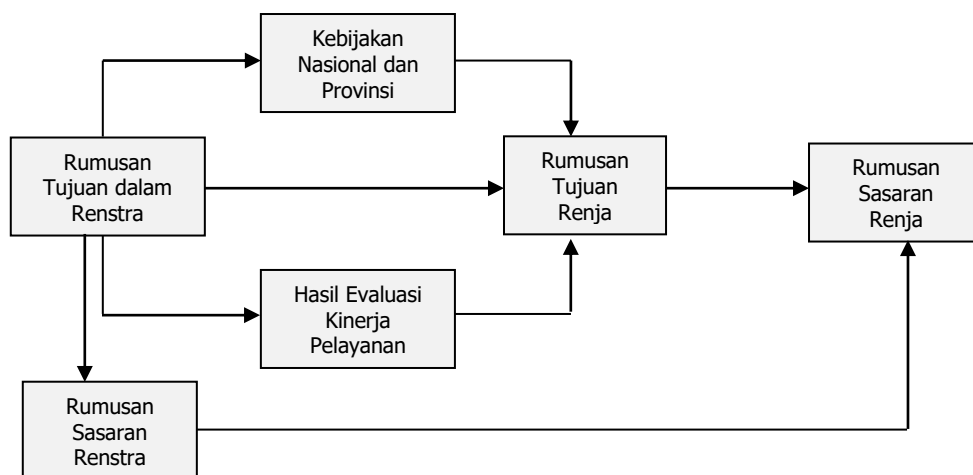
Tujuan:

1. Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar diujung jari); dan
2. Menuju Government Publik relation (GPR);

Sasaran:

- 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
- 2 Terwujudnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terpadu;
- 3 Meningkatnya akses informasi masyarakat;

Mengacu kepada arah kebijakan umum dan program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMINFO

Adapun hasil rumusan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

| NO | Tujuan | Sasaran |
|----|---|---|
| 1 | Menuju Tanah Datar Smart Regency (Tanah Datar diujung Jari) | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja; |
| | | 2. Terwujudnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terpadu; |
| 2 | Menuju Government Publick Relation (GPR) | 1. Meningkatnya akses informasi masyarakat; |

Sumber : Dinas Kominfo

B. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan dan diwujudkan dalam bentuk program yang diaplikasikan terhadap kegiatan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kabupaten. Adapun sasaran dan program dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.2
SASARAN DAN PROGRAM

| No | Sasaran Strategis | Kegiatan |
|----|---|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 2 | Terwujudnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang Terpadu | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 3 | Meningkatnya akses informasi masyarakat | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |

Sumber : Dinas Kominfo

C. Program dan Kegiatan

1. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pada RPJMD 2021-2026, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 6 misi dan 10 agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industry dan UMKM.
3. Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi ke-6 ini yaitu peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.

10 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar
6. Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kandung dan Organisasi Keagamaan
8. Membangun jaringan telekomunikasi
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
10. Perbaiki irigasi

Untuk menjawab isu – isu tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar membuat Rencana kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2024 antara lain :

1. Mempasilitasi Penyediaan jaringan seluler untuk Daerah yang belum terjangkau sinyal seluler, di kabupaten tanah Datar.

Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2024 disusun dan dibahas dalam Forum antar SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tanah Datar tahun 2023

3.3. Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024

Rencana program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Program dan kegiatan Tahun 2023

| NO. | URUSAN | URAIAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN | ALOKASI DANA (Rp.) |
|----------|---|---|----------------------|
| 1 | BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | 1.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.853.254.420 |
| | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.530.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | 15.530.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.000.000 |
| | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.330.760.420 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.310.760.420 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20.000.000 |
| | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 52.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 52.000.000 |
| | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 414.664.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.900.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.300.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 166.364.000 |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.500.000 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 7.600.000 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 288.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 140.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 145.000.000 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 478.300.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 160.000.000 |
| | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000 |
| | Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya | 10.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 301.300.000 |
| 7. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 249.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 150.000.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 99.000.000 |
| 1.2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3.525.000.000 |
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.525.000.000 |
| | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 25.000.000 |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 2.000.000.000 |
| | Pelayanan Informasi Publik | 125.000.000 |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 175.000.000 |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 1.200.000.000 |
| 1.3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 3.442.000.000 |
| 1 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.442.000.000 |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 816.000.000 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2.626.000.000 |
| 2. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | |
| 2.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 900.000.000 |
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 900.000.000 |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengelolaan analisis dan Deseminasi data statistik Sektoral. | 200.000.000 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi | 250.000.000 |
| | Membangun Meta Data Statistik Sektoral | 150.000.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 150.000.000 |
| | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 150.000.000 |
| 3. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | |
| 3.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 450.000.000 |
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 |
| 2. | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perakat Daerah kabupaten kota | 150.000.000 |
| | Oprasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten Kota | 150.000.000 |
| | Jumlah | 13..176.254.420 |

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2023 perkiraan maju Tahun 2024
Tabel 3.5 terlampir :Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | Sumber Dana | Jumlah Pagu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | Usuran Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | 13.322.888.120 | | | 14.780.656.932 | | | |
| 2 | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | 10.257.888.120 | | | 11.409.156.932 | | | |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 4.747.888.120 | | | 5.485.356.932 | | | |
| 2 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | | | | 16.500.000 | | | 12.100.000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Terlaksananya perencanaan tahunan | Kominfo | 4 Dokumen | DAU | 11.000.000 | 4 Dokumen | 12.100.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Lakip | Kominfo | 1 Dokumen | | 5.500.000 | 1 Dokumen | 6.050.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan | | | | | 3.321.760.420 | | 3.653.936.462 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Kominfo | 31 Orang | DAU | 3.310.760.420 | 31 Orang | 3.641.836.462 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya LAKIP | Kominfo | 2 Dokumen | DAU | 11.000.000 | 2 Dokumen | 12.100.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 16.500.000 | | 18.150.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya anggaran pendidikan dan pelatihan | Kominfo | 20 Orang | | 16.500.000 | | 18.150.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---------|--------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 341.363.700 | | | 644.230.070 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | Kominfo | 100% | | 4.400.000 | | | 4.840.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya ATK | Kominfo | 75 Jenis | | 44.000.000 | | | 48.400.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Kominfo | 20 Jenis dan 8500 Lembar | | 12.100.000 | | | 13.310.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Kominfo | | | 166.364.000 | | | 183.000.400 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minum | Kominfo | 15 Kali Rapat | | 11.000.000 | | | 12.100.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kominfo | 20 Paket | | 93.500.000 | | | 102.850.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terselenggaranya kearsipan dengan pada skpd | Kominfo | 100% | | 4.999.850 | | | 5.499.835 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | Terselenggaranya adm perkantoran berbasis elektronik | Kominfo | 100% | | 4.999.850 | | | 5.499.835 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 242.650.000 | | | 266.915.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya prangko dan benda pos Lainnya | Kominfo | 165 Materai 10000 | | 1.650.000 | | | 1.815.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan sumber daya air | Kominfo | 100% | | 121.000.000 | | | 133.100.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terselenggaranya Kebersihan Kantor | Kominfo | 4 Orang THL,25 Jenis | | 120.000.000 | | | 132.000.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---------|---|--|----------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 426.614.000 | | | 469.275.400 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | Kominfo | 6 unit roda 4, dan 4 unit roda 2 | | 123.214.000 | | | 135.535.400 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebeleur kantor | Kominfo | | | 1.100.000 | | | 1.210.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpeliharanya mesin genset | Kominfo | 3 unit genset | | 1.000.000 | | | 1.100.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | Kominfo | 3 unit gedung kantor | | 301.300.000 | | | 331.430.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 399.000.000 | | | 438.900.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kominfo | 10 Unit Kendaraan Roda 2 | | 300.000.000 | | | 330.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Kominfo | 5 Buah Hardisk eksternal, 2 Unit Mesin Penghancur Kertas, 3 Unit Mesin Absensi, 3 Unit Lemari Arsip | | 99.000.000 | | | 108.900.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | 3.795.000.000 | | | 4.174.500.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | | 3.795.000.000 | | | 4.174.500.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Monitoring | Kominfo | | | 20.000.000 | | | 22.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tersedianya Informasi Luar Ruang | Kominfo | 1 Paket Videotron | | 2.000.000.000 | | | 2.200.000.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|---------|-------------------|--|----------------------|--|-------------|----------------------|
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | tersedianya data dan informasi tentang pemerintah daerah oleh PPID | Kominfo | | | 250.000.000 | | | 275.000.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | Kominfo | | | 275.000.000 | | | 302.500.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunikasi | tersedianya layanan informasi publik melalui KIM, Media Center dan radio | Kominfo | | | 1.250.000.000 | | | 1.375.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Program Aplikasi Informatika | | | | | 1.715.000.000 | | | 1.749.300.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e - government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | | 1.715.000.000 | | | 1.749.300.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya Dokumen Master Plan dan Terlaksananya aplikasi dan website di kab. Tanah Datar | Kominfo | 23 Aplikasi | | 600.000.000 | | 30 Aplikasi | 612.000.000 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tersedianya jaringan fiber optik dan internet | Kominfo | 39 OPD | | 1.115.000.000 | | 39 OPD | 1.137.300.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | 3.000.000.000 | | | 3.300.000.000 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | | | | | 3.000.000.000 | | | 3.300.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya Dokumen Data Sektoral | Kominfo | 1 Dokumen | | 500.000.000 | | | 550.000.000 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi | Terlaksananya Capacity Building Pengelola Data | Kominfo | 24 Pengelola Data | | 250.000.000 | | | 275.000.000 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Meta Data Statistik Sektoral | Terlaksananya Sosialisasi Metadata Kegiatan | Kominfo | 75 Operator | | 150.000.000 | | | 165.000.000 |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|------|----|---|---|---------|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Terselenggaranya Penyusunan Standar Data | Kominfo | 1 Kegiatan | | 50.000.000 | | 55.000.000 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Infrastruktur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data | Kominfo | 2 Buah Laptop dan 1 Printer | | 50.000.000 | | 55.000.000 |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Terolahnya data dan statistik daerah | Kominfo | 75 Nagari | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | | | | Urusan Pemerintah Bidang Persandian | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | 65.000.000 | | 71.500.000 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | | | | | 65.000.000 | | 71.500.000 |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya pelaksanaan teknis persandian | Kominfo | | | 65.000.000 | | 71.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 13.322.888.120 | | 14.780.656.932 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Mempedomani analisa capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun ini serta mempertimbangkan kebutuhan, isu-isu strategis dibidang/ urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel, efisien dan efektif dengan didukung pemerintahan yang e government dan menuju Tanah Datar satu data, untuk itu dirasa perlu merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar

Agar Kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Kerangka Pendanaan di perkirakan diperoleh dari APBD dan sumber dana lainnya dalam bentuk kerjasama. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam table berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun masih mempedomani rencana strategis tahun 2021-2025 untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga program dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran visi dan misi Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja tahun 2023 adalah skala prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah agar lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan antar Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang melaksanakan fungsi lain. Dan berharap rencana kerja ini juga memberikan peningkatan kualitas, kuantitas kinerja Komunikasi dan Informatika.

Kami menyadari rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritikan perlu sehingga terwujudnya dan tercapinya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika

Batusangkar, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. YUSRIZAL, MM
NIP. 19660601 199403 1 005



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Tahun Perencanaan : 2024

Nama Organisasi **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2024 | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | Sumber Dana | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pagu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | 10.397.724.420 | | | 10.997.081.862 | | | |
| 2 | 16 | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | 9.817.474.420 | | | 10.507.306.862 | | | |
| 2 | 16 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi | | 4.859.474.420 | | | 5.323.586.862 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | 15.000.000 | | | 7.865.000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Terlaksananya perencanaan tahunan | Kominfo | 4 Dokumen | DAU | 7.150.000 | 4 Dokumen | 7.865.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Lakip | Kominfo | 1 Dokumen | | 7.850.000 | 1 Dokumen | 8.635.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan | | | | | | 3.319.510.420 | | 3.651.461.462 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | Kominfo | 31 Orang | DAU | 3.310.760.420 | 31 Orang | 3.641.836.462 |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya LAKIP | Kominfo | 2 Dokumen | DAU | 8.750.000 | 2 Dokumen | 9.625.000 |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000 | | 16.500.000 |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya anggaran pendidikan dan pelatihan | | Kominfo | 20 Orang | | 15.000.000 | | 16.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 369.964.000 | | 716.060.400 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | Kominfo | 100% | | 6.800.000 | | 7.480.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya ATK | Kominfo | 75 Jenis | | 30.000.000 | | 33.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Kominfo | 20 Jenis dan 8500 Lembar | | 15.300.000 | | 16.830.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Kominfo | | | 166.364.000 | | 183.000.400 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | | Sumber Dana | Jumlah Pagu | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minum | Kominfo | 15 Kali Rapat | | 15.000.000 | | | 16.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kominfo | 20 Paket | | 125.000.000 | | | 137.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terselenggaranya kearsipan dengan pada skpd | Kominfo | 100% | | 6.500.000 | | | 7.150.000 |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | Terselenggaranya adm perkantoran berbasis elektronik | Kominfo | 100% | | 5.000.000 | | | 5.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 278.000.000 | | | 305.800.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya prangko dan benda pos Lainnya | Kominfo | 250 Materai 10000 | | 3.000.000 | | | 3.300.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan sumber daya air | Kominfo | 100% | | 140.000.000 | | | 154.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terselenggaranya Kebersihan Kantor | Kominfo | 4 Orang THL,25 Jenis | | 135.000.000 | | | 148.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 410.000.000 | | | 451.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | Kominfo | 7 unit roda 4, dan 4 unit roda 2 | | 145.000.000 | | | 159.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya mebeleur kantor | Kominfo | | | 5.000.000 | | | 5.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpeliharanya mesin genset | Kominfo | 3 unit genset | | 10.000.000 | | | 11.000.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | Kominfo | 3 unit gedung kantor | | 250.000.000 | | | 275.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 174.000.000 | | | 191.400.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kominfo | 5 Unit Kendaraan Roda 2 | | 75.000.000 | | | 82.500.000 |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | Kominfo | 3 Buah Hardisk eksternal, 2 Unit Mesin Pembancur | | 99.000.000 | | | 108.900.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | 1.582.000.000 | | | 1.740.200.000 |
| 2 | 16 | 02 | 2.10 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | | | | 1.582.000.000 | | | 1.740.200.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | Sumber Dana | Jumlah Pagu | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | 21 | 02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 210.000.000 | | | 82.500.000 | | | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 150.000.000 | | | 82.500.000 | | | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 04 | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya pelaksanaan teknis persandian | Kominfo | | 75.000.000 | | | 82.500.000 |
| | | | | | Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kab. Kota berbasis Eletronik dan Non Eletronik | Tersedianya Indeks keamanan informasi (KAMI) | Kominfo | | 75.000.000 | | | |
| | | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi atar perangkat Daerah Kab. /Kota | | | | 60.000.000 | | | |
| 2 | 20 | 2 | 2 | | Operasional jaring Komunikasi sandi Peemrintah Daerah | Terselenggaranya pola Hubungan Komur | Kominfo | | 60.000.000,00 | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | 10.397.724.420 | | | 10.997.081.862 |

Batusangkar, Maret 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. YUSRIZAL, MM
NIP. 19660601 199403 1 005